

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Agustina. Rosa dan Suharnoko, 2012, *Hukum Perikatan (Law of Obligations)*, Pustaka Larasan, Bali.
- Ali. Zainuddin, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Barun. Badriyah, 2013, *Solusi Sengketa Tanah dan Bangunan*, Pustaka Yustisia, Jakarta.
- Fuady. Munir, 2013, *Perbuatan Melawan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Harsono. Boedi. 2005. *Hukum Agraria Indonesia*. Jakarta: Djambatan.
- Hermit. Herman, 2014, *Cara Memperoleh Sertifikat Tanah Hak Milik Tanah Negara dan Tanah Pemda*, Mandar Maju, Bandung.
- Hutagalung. Sophar Maru, 2013, *Kontrak Bisnis di Asean (Pengaruh Sistem Hukum Common Law dan Civil Law)*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Irianto. Sigit, 2000, *Asas-Asas Hukum Perikatan (Perikatan yang Lahir dari Perjanjian)*, FH UNTAG, Semarang.
- Iskandar. Mudakir, 2014, *Hak Guna Usaha dan Hak Guna Bangunan Sumber Konflik Pertanahan*, Lentera Ilmu Cendekia, Jakarta.
- Mertokusumo. Sudikno, 2014, *Perbuatan Melawan Hukum oleh Pemerintah*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta
- Muhammad. Abdulkadir, 1993, *Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- _____. 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Muljadi. Kartini dan Gunawan Widjaja, 2004, *Perikatan Pada Umumnya*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Nazir. M, 2011, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Santoso. Urip, 2015, *Perolehan Hak Atas Tanah*, Prenadamedia Group, Jakarta
- Soekanto. Soerjono, 2014, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soemitro. Ronny Hanintjo, 1982, *Metode Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Susanti. Dyah Ochtorina dan A'an Efendi, 2014, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Sinar Grafika, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

HIR (*Het Herziene Indonesisch Reglement*, S 1941:44).

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah jo. UU No 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2014.

UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan

Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai Atas Tanah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 5 Tahun 1973 Tentang Ketentuan-Ketentuan Mengenai Tata Cara Pemberian Hak Atas Tanah.

Peraturan Menteri Agraria No. 9 Tahun 1965 Tentang Pelaksanaan Konversi Hak Penguasaan Atas Tanah Negara dan Ketentuan-Ketentuan Tentang Kebijakan-selanjutnya.

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan.

C. Putusan

Putusan Nomor 25/Pdt.G/2015/PN.TMG

D. Internet

Novrita. Audia, 2013, *Makalah Hukum Perjanjian*, <https://audiiayu.wordpress.com/2013/04/14/makalah-hukum/perjanjian/>, Diakses pada tanggal 2 Februari 2017.

Suriyani. Rina, 2013, *Pengertian Metode dan Metodologi*, <http://rinawssuriyani.blogspot.co.id/2013/04/pengertian-metode-dan-metodologi.html>, Diakses pada tanggal 15 November 2016.

Setiawan. Gigih, 2014, *Perbuatan Hukum dalam Hukum Perdata*, <http://gigihsetiawan.blogspot.co.id/2014/10/perbuatan-melanggar-dalam-hukum-perdata.html>, Diakses pada tanggal 8 Januari 2017.

Walisongo. Asaku, 2012, *Jenis-jenis Tindakan Pemerintah dalam Menjalankan Negara*, <http://www.contohlengkap.com/2012/04/jenis-jenis-tindakan-pemerintah-dalam.html>, Diakses pada tanggal 15 Februari 2017.